

Judul : Agar bansos tepat sasaran, legislator sarankan evaluasi data berkala
Tanggal : Sabtu, 16 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Agar Bansos Tepat Sasaran Legislator Sarankan Evaluasi Data Berkala



Dini Rahmania

ANGGOTA Komisi VIII DPR Dini Rahmania menyortir proses *ground check* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos). Persoalan validasi data bansos ini masih menjadi keluhan di banyak daerah.

Dini akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar proses pembaruan dan verifikasi data penerima bansos dapat dipercepat. Hingga saat ini, masih banyak data masyarakat yang belum melalui proses *ground check* maupun verifikasi dan validasi oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, proses *ground checking* dan verifikasi faktual data penerima bansos harus segera diselesaikan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. "Jadi yang berhak, mendapatkan bantuan, dan yang sudah tidak berhak, tidak mendapatkan bantuan," ungkap politikus Nasdem ini.

Senada, anggota Komisi VI DPR Nasim menilai, penyaluran bansos selama ini masih belum tepat sasaran. Persoalan utama terletak pada lemahnya pendataan dan minimnya verifikasi di lapangan.

Nasim menyebut sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), masih kerap diterima oleh warga yang tidak berhak. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.

"Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat yang layak justru belum mendapatkan bantuan," ujar Nasim dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nasim mengusulkan langkah konkret berupa pencatatan dan penandaan pada setiap rumah penerima bansos. Cara ini dapat membantu proses pengawasan dan memastikan transparansi di tingkat desa maupun kelurahan.

Nasim mendorong optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem baru pengganti DTKS. "DTSEN harus benar-benar dikawal implementasinya," tandas politisi PKB ini.

Selain itu, dia meminta dilakukan verifikasi, pemutakhiran, perbaikan, dan evaluasi data penerima secara berkala. Sinergi antara Pemerintah Desa (Pemdes), kelurahan, dinas sosial kabupaten, hingga *stakeholder* terkait menjadi kunci agar data penerima bansos lebih akurat.

Ia mengungkapkan, berbagai persoalan klasik masih terjadi di daerah. Mulai dari data warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masih tercatat, hingga dugaan permainan oknum di tingkat bawah. Bahkan, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum validasi data dinilai belum berjalan transparan.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan verifikasi lapangan secara rutin hingga tingkat RT/RW dan memperbarui data minimal beberapa kali dalam setahun. Buka mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan transparansi daftar penerima bansos. ■ TIF